



LAPORAN KINERJA

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2023



Misrani Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan ini merupakan perwujudan atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan rencana strategis tahun 2021-2026 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan. Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target, karena Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap seluruh jajaran yang berada di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat

mendukung kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Paringin, 29 Desember 2023

Kepala Dinas,



H. RIBOWO, S.Pd, M.AP

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196610011990011002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. LATAR BELAKANG.....	1
2. MAKSUD DAN TUJUAN.....	1
3. ASPEK STRATEGIS	2
4. KONDISI UMUM PERANGKAT DAERAH	2
A. ORGANISASI	2
B. PERSONALIA	5
5. SISTEMATIKA PENULISAN LAKIP	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
1. PENYESUAIAN RENCANA STRATEGIS 2021-2026	7
A. TUJUAN DAN SASARAN	7
B. KEBIJAKAN DAN PROGRAM.....	7
2. RENCANA KINERJA TAHUN 2023	9
3. RENCANA KINERJA TAHUN 2024	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
1. PENGUKURAN KINERJA	26
2. ANALISA CAPAIAN KINERJA.....	27
2.1. PERSENTASE KOPERASI BEKUALITAS.....	27
2.2. PERSENTASE USAHA MIKRO YANG HASIL LABANYA MENINGKAT	29
2.3. PENINGKATAN VOLUME PERDAGANGAN	30
2.4. INDEX PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KABUPATEN BALANGAN .	31
2.5. PERSENTASE IKM YANG OMZETNYA MENINGKAT	33
3. REALISASI ANGGARAN.....	35
BAB IV PENUTUP	45
LAMPIRAN	46

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan media untuk menyampaikan informasi sampai sejauh mana instansi pemerintah, dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan, melaksanakan rencana strategis dan memenuhi tuntutan perubahan yang ada dimasyarakat. LKIP merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja yang dicapai lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah.

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 014 tentang Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Semua Unit Kerja mandiri wajib menyampaikan Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian akhir dari sistem AKIP adalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). LKIP disusun pada akhir periode pelaksanaan program/kegiatan sebagai tolok ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja, dimana capaian kinerja dikomunikasikan kepada para stakeholders sebagai bahan penilaian dan evaluasi kinerja yang selanjutnya untuk diambil keputusan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan ditahun yang akan datang.

LKIP memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, LKIP merupakan sarana bagi SKPD untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Kedua, LKIP merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja SKPD sebagai upaya untuk

memperbaiki kinerja di masa yang akan datang atau dalam upaya peningkatan kinerja (performance improvement) organisasi, baik dalam bentuk regulasi, distribusi maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

3. ASPEK STRATEGIS

Penyusunan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tidak lepas dari tujuan akhir yang ingin dicapai yaitu meningkatkan produktifitas Koperasi dan Usaha Mikro, meningkatnya kontribusi PDRB Sektor Industri serta meningkatkan kontribusi perdagangan pada Ekonomi Daerah. hal ini sejalan dengan misi II Kabupaten Balangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 yang berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatnya koperasi yang Berkualitas, meningkatnya laba Usaha Mikro, meningkatnya pendapatan IKM, meningkatnya produktivitas perdagangan dan meningkatnya perlindungan konsumen.

4. KONDISI UMUM PERANGKAT DAERAH

A. ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Balangan nomor 82 tahun 2021 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi, pendidikan dan latihan perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro/kecil dan perencanaan pembangunan industri, usaha industri, sistem informasi industri nasional, sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standarisasi dan perlindungan kosumen serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Unsur-unsur organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian.

b. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan pembinaan, pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro.

c. Bidang Sarana dan Pengembangan Perdagangan

Bidang Sarana dan Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan sarana dan pengembangan perdagangan.

d. Bidang Standardisasi, Stabilisasi dan Pengawasan Perdagangan

Bidang Standardisasi, Stabilisasi dan Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan standardisasi, stabilisasi dan pengawasan perdagangan.

e. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan kerjasama, pengawasan dan promosi investasi, pembangunan sumber daya industri serta sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan industri.

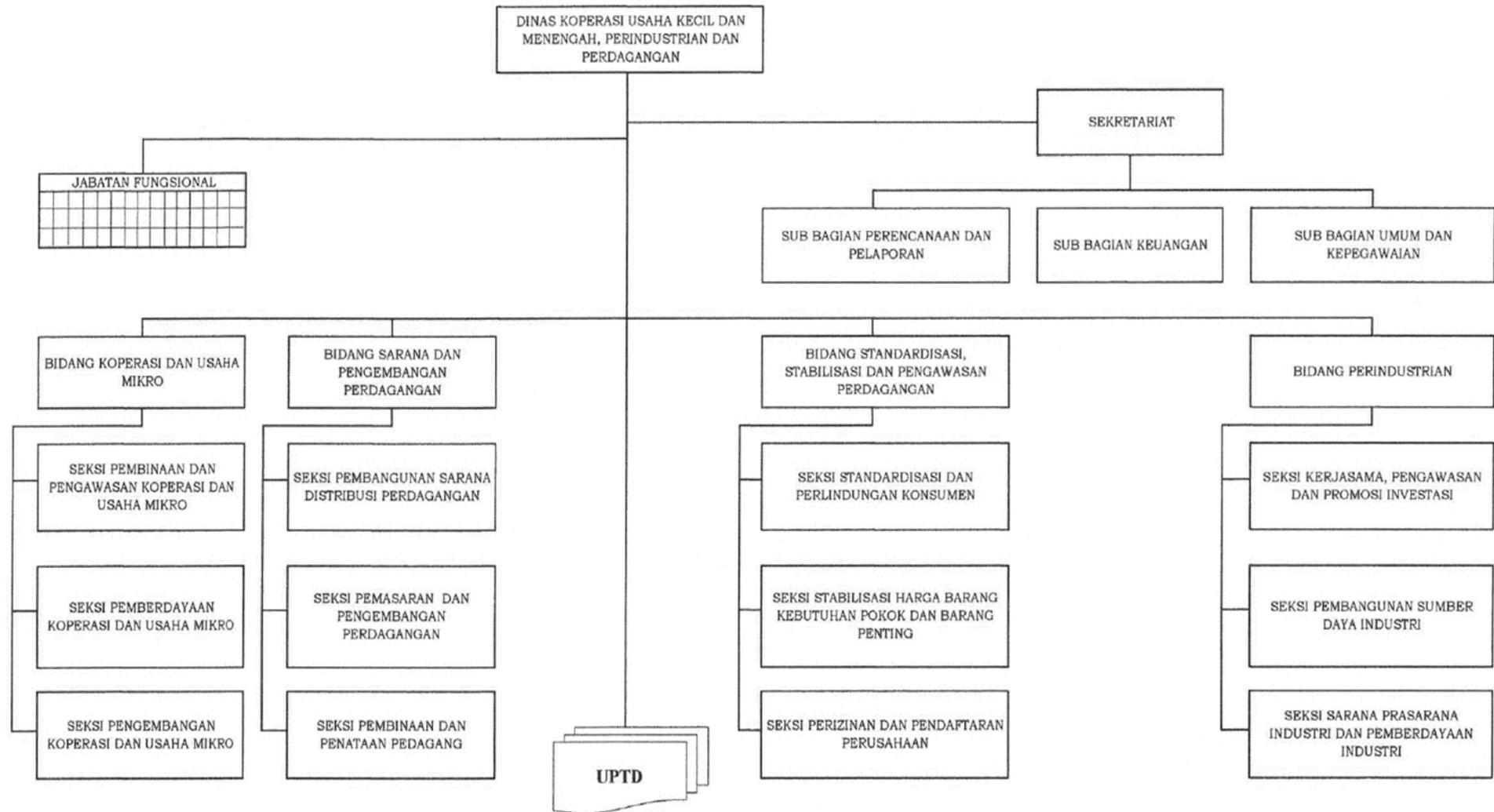
f. Unit Pelaksana Teknis Daerah

UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional (kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat) dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu (kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas) pada Dinas.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 KABUPATEN BALANGAN



B. PERSONALIA

Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan pada tahun 2023 adalah sebanyak 37 orang yang dapat dikelompokkan menurut golongan dan jenjang pendidikan sebagai berikut :

TINGKAT PENDIDIKAN		GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	SD	1				1
2	SMP		1			1
3	SMA		5			5
4	D - 1					
5	D - 2					
6	D - 3			5		5
7	D - 4					
8	S - 1			16	2	18
9	S - 2			2	5	7
10	S - 3					
JUMLAH		1	6	23	7	37

5. SISTEMATIKA PENULISAN LAKIP

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan ini dilakukan dengan membentuk fokus grup, yang berperan mengevaluasi kembali unsur penyesuaian renstra atau menguraikan lebih lanjut rumusan tujuan dan sasaran dinas pada penyesuaian renstra tahun 2021-2026 menjadi sasaran yang lengkap dengan indikator kinerjanya. Masing-masing kegiatan tahun 2023 yang sudah dilaksanakan oleh satuan kerja akan dikaitkan dengan sasaran yang hendak dicapai oleh dinas. Adapun sistematika penyusunan LKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG
2. MAKSUD DAN TUJUAN
3. ASPEK STRATEGIS
4. KONDISI UMUM PERANGKAT DAERAH
 - A. ORGANISASI
 - B. PERSONALIA
5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. PENYESUAIAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021

- A. TUJUAN DAN SASARAN
- B. KEBIJAKAN DAN PROGRAM
- 2. RENCANA KERJA TAHUN 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
 - A. BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO
 - B. BIDANG PERINDUSTRIAN
 - C. BIDANG SARANA DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN
 - D. BIDANG STANDARDISASI, STABILITASI DAN PENGAWAAN PERDAGANGAN
- 2. REALISASI ANGGARAN
- 3. KINERJA LAINNYA

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. PENYESUAIAN RENCANA STRATEGIS 2021-2026

A. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang merupakan penjabaran atau implementasi dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai atau dihasilkan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan. Adapun Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan selama lima tahun kedepan tidaklah lepas dari misi II dalam RPJMD Kabupaten Balangan yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan tujuan meningkatkan produktifitas Koperasi dan Usaha Mikro, meningkatnya kontribusi PDRB Sektor Industri dan meningkatkan kontribusi perdagangan pada Ekonomi Daerah dengan sasaran meningkatnya koperasi yang Berkualitas, meningkatnya laba Usaha Mikro, meningkatnya pendapatan IKM, meningkatnya produktivitas perdagangan dan meningkatnya perlindungan konsumen.

B. KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Kebijakan dan program merupakan wujud operasionalisasi dari strategi, yaitu suatu cara mengelola risiko dengan memaksimalkan segala kekuatan dan menyembunyikan kelemahan untuk mengisi/memanfaatkan semua peluang dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

1. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu, kebijakan yang dimaksudkan dalam cara pencapaian tujuan dan sasaran harus disusun oleh organisasi dengan berdasarkan arahan dari pimpinan organisasi. Adapun kebijakan yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah :

- a. Mendorong pendirian koperasi baru dan melakukan pembinaan serta monitoring dan evaluasi kinerja koperasi,
- b. Melaksanakan paket pelatihan dan bimbingan usaha perkoperasian,
- c. Melaksanakan paket pelatihan dan bimbingan serta peningkatan pemasaran produk berbasis e-commerce,
- d. Memberikan bantuan alat usaha bagi usaha mikro dalam peningkatan skala usaha bertambah,
- e. Peningkatan kapasitas produksi, teknik pengolahan produk dan diversifikasi produk IKM,
- f. Memfasilitasi IKM dalam legalitas usaha sektor industri,
- g. Memfasilitasi sertifikasi produk dan peningkatan nilai pemasaran produk,
- h. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan melalui pemenuhan SNI 8152:2021,
- i. Peningkatan tujuan ekspor, pembinaan calon pelaku usaha ekspor serta fasilitasi dalam pameran dagang nasional,
- j. Fasilitasi kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi,
- k. Memfasilitasi pelaku usaha dalam perizinan sektor perdagangan,
- l. Melakukan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang serta menggelar operasi pasar dalam penanganan inflasi daerah dan penurunan stunting,
- m. Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang serta peningkatan pengawasan metrologi legal dengan penguatan SDM penera.

2. Program

Program adalah rencana tindak jangka panjang yang secara sistematis mengarahkan seluruh aktivitas yang akan dilaksanakan ke arah tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program-program yang ditetapkan dalam penyesuaian rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- b. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

- c. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
- d. Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah
- e. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- f. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
- g. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
- h. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- i. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- j. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- k. Program Pengembangan Ekspor
- l. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
- m. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

2. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja tahun 2023 merupakan komitmen seluruh unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dokumen ini memuat 13 Program prioritas dengan 40 sasaran strategis. Program adalah rencana tindak jangka panjang yang secara sistematis mengarahkan seluruh aktivitas yang akan dilaksanakan ke arah tercapainya tujuan dan sasaran.

Adapun uraian lebih lanjut dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

ESSELON II

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Koperasi Berkualitas	%	7.04
2	Meningkatnya Laba Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang Hasil Labanya Meningkatkan	%	25.79
3	Meningkatnya Produktivitas Perdagangan	Peningkatan Volume Perdagangan	Miliar Rupiah	791.20
4	Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Index Perlindungan Konsumen di Kabupaten Balangan	Nilai	0.0480

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target
5	Meningkatnya Pendapatan IKM	Persentase IKM yang Omzetnya Meningkat	%	1.18

ESSELON III

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target
6	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	%	63.69
7	Meningkatnya Kompetensi SDM Koperasi	Persentase Peserta Pelatihan yang Lulus Kompetensi Koperasi	%	100
8	Meningkatnya Kompetensi Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang Memenuhi Kualifikasi Standar Kompetensi Usaha	%	65.00
9	Meningkatnya Pemasaran Produk Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang Menerapkan E-Commerce	%	0.15
10	Meningkatnya Skala Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang Skala Usahanya Bertambah	%	4.38
11	Meningkatkan Tertib Perijinan Sektor Perdagangan	Persentase Pelaku Usaha Perdagangan yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan	%	12.00
12	Meningkatkan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	7.60
13	Meningkatnya Pengembangan Pelaku Usaha Ekspor	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Ekspor	%	30
14	Meningkatnya Tertib Ukur	Persentase Jumlah Kegiatan Metrologi Legal Dilaksanakan	%	61.53
15	Meningkatnya Pengawasan Metrologi Legal	Persentase Jumlah Kegiatan Pengawasan Metrologi Legal Dilaksanakan	%	20.83

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target
16	Meningkatnya Penerapan Teknologi pada IKM	Persentase IKM yang Menerapkan Teknologi Industri	%	12.00
17	Meningkatnya Pertumbuhan IKM	Persentase Pertumbuhan IKM	%	1.68
18	Meningkatnya IKM yang Berkembang	Persentase Skala Usaha IKM yang Berkembang	%	0.58

ESSELON IV

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target
19	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	60
20	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	Unit usaha	11567
21	Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah unit Usaha yang telah melaksanakan Kemitraan usaha mikro	Unit usaha	16
22	Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit Usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	Unit usaha	40

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target
23	Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dalam dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta Desain dan teknologi	Unit usaha	509
24	Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1
25	Terfasilitasinya Proses Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Dokumen	30
26	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	unit	3
27	Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	unit	4
28	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	1
29	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	1

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target
30	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	12
31	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	1
32	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	Pelaku usaha	10
33	Terbinanya Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang dibina	Pelaku usaha	3
34	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	10
35	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan ditera ulang	Unit	1200
36	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah pelaku usaha dibidang metrologi legal yang dibina	Orang	50

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target
37	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana distribusi	Dokumen	1
38	Terfasilitasinya Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Jumlah dokumen hasil fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri dan/atau dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dengan resiko usaha menengah-tinggi dan tinggi, melalui SIINas yang terintegritas dengan sistem OSS	Dokumen	1
39	Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1
40	Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	Jumlah Dokumen hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas Kabupaten/Kota	Dokumen	1

SASARAN

- 1 Meningkatnya koperasi yang Berkualitas,
- 2 Meningkatnya laba Usaha Mikro,
- 3 Meningkatnya pendapatan IKM,

- 4 Meningkatkan produktivitas perdagangan dan
- 5 Meningkatkan perlindungan konsumen.
- 1 **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**
 - 1 **Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**
 - 1 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2 **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**
 - 1 **Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/kota**
 - 1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
- 3 **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)**
 - 1 **Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan**
 - 1 Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro
 - 2 Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro
 - 3 Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro
- 4 **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**
 - 1 **Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil**
 - 1 Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran, SDM, serta Desain dan teknologi
- 5 **PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**
 - 1 **Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**
 - 1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - 2 **Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri**
 - 1 Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik
- 6 **PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**

- 1 **Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**
 - 1 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - 2 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
- 2 **Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**
 - 1 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
 - 2 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
- 7 **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**
 - 1 **Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**
 - 1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan
 - 2 Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
- 8 **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**
 - 1 **Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**
 - 1 Pameran Dagang Nasional
 - 2 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
- 9 **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**
 - 1 **Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**
 - 1 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
- 10 **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**
 - 1 **Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**
 - 1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
 - 2 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
- 11 **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**
 - 1 **Penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota**
 - 1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
- 12 **PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**
 - 1 **Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**

- 1 Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten / kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegritas dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
- 13 **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**
- 1 **Penyediaan informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**
 - 1 Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
 - 2 Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas Kabupaten/Kota

3. RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja tahun 2024 merupakan komitmen seluruh unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dokumen ini memuat 9 Program prioritas dengan 30 sasaran strategis. Program adalah rencana tindak jangka panjang yang secara sistematis mengarahkan seluruh aktivitas yang akan dilaksanakan ke arah tercapainya tujuan/sasaran.

Adapun uraian lebih lanjut dokumen tersebut adalah sebagai berikut :

ESSELON II

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Produktivitas Perdagangan	Peningkatan Volume Perdagangan	Milyar Rupiah	831,350
2	Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Index Perlindungan Konsumen di Kabupaten Balangan	Nilai	0,0549
3	Meningkatnya Pendapatan IKM	Persentase IKM yang Omzetnya Meningkat	%	1,68

ESSELON III

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target
4	Meningkatkan Tertib Perijinan Sektor Perdagangan	Persentase Pelaku Usaha Perdagangan yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan	%	15.15
5	Meningkatkan Sarana Prasarana Perdagangan dalam Kondisi Baik	Persentase Pasar di Kabupaten Balangan yang Memenuhi Standar Kelayakan Pasar	%	10.00
6	Meningkatkan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	7.40
7	Meningkatnya Pengembangan Pelaku Usaha Ekspor	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Ekspor	%	50.00
8	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Nilai Produk Lokal	%	7.88
9	Meningkatnya Tertib Ukur	Persentase Jumlah Kegiatan Metrologi Legal Dilaksanakan	%	69.23
10	Meningkatnya Pengawasan Metrologi Legal	Persentase Jumlah Kegiatan Pengawasan Metrologi Legal Dilaksanakan	%	25.00
11	Meningkatnya Penerapan Teknologi pada IKM	Persentase IKM yang Menerapkan Teknologi Industri	%	13.00
12	Meningkatnya Pertumbuhan IKM	Persentase Pertumbuhan IKM	%	1.98
13	Meningkatnya IKM yang Berkembang	Persentase Skala Usaha IKM yang Berkembang	%	1.58

ESSELON IV

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target
14	Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumentasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1
15	Terfasilitasinya Proses Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Dokumen	9
16	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	unit	7
17	Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	unit	10
18	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	1
19	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	1

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target
20	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	12
21	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	1
22	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	Pelaku usaha	15
23	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku usaha	4
24	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	20
25	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan ditera ulang	Unit	1300

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target
26	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah pelaku usaha dibidang metrologi legal yang dibina	Orang	50
27	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana distribusi	Dokumen	1
28	Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	1

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target
29	Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen hasil Fasilitas pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1
30	Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	Jumlah Dokumen hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas Kabupaten/Kota	Dokumen	1

SASARAN

- 1 **Meningkatnya pendapatan IKM,**
- 2 **Meningkatnya produktivitas perdagangan dan**
- 3 **Meningkatnya perlindungan konsumen.**
 - 1 **PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**
 - 1 **Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**
 - 1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - 2 **Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri**
 - 1 Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik
 - 2 **PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**
 - 1 **Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**
 - 1 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - 2 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - 2 **Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**
 - 1 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
 - 2 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

- 3 **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**
 - 1 **Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**
 - 1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan
 - 2 Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
- 4 **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**
 - 1 **Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**
 - 1 Pameran Dagang Nasional
 - 2 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
- 5 **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**
 - 1 **Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**
 - 1 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
- 6 **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**
 - 1 **Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**
 - 1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
 - 2 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
- 7 **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**
 - 1 **Penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota**
 - 1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
- 8 **PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**
 - 1 **Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**
 - 1 Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten / kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegritas dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
- 9 **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**
 - 1 **Penyediaan informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**
 - 1 Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

- 2 Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas Kabupaten/Kota

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran, keluaran dari masing-masing kegiatan serta hasil (outcome) yang dicapai.

LKIP 2023 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Perjanjian Kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*) dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukurannya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan, menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIAN PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

1. PENGUKURAN KINERJA

Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan kinerja tahun ke-3 pada periode Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2021-2026. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 115.66% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2023 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas				
No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase Koperasi Berkualitas	7.04	8.04	114.20
Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Laba Usaha Mikro				
No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase Usaha Mikro yang Hasil Labanya Meningkatkan	25.79	26.49	102.71
Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Produktivitas Perdagangan				
No	Indikator Kinerja	Target (Miliar Rupiah)	Realisasi (Miliar Rupiah)	Capaian (%)
1	Peningkatan Volume Perdagangan	791.20	751.05*	94.93

Keterangan :

* : Realisasi menggunakan realiasi tahun 2022

BPS, Kabupaten Balangan Dalam Angka 2023

Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Perlindungan Konsumen				
No	Indikator Kinerja	Target (Nilai)	Realisasi (Nilai)	Capaian (%)
1	Index Perlindungan Konsumen di Kabupaten Balangan	0.0480	0.0799	166.46
Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Pendapatan IKM				
No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase IKM yang Omzetnya Meningkat	1.18	1.18	100.00
Rata-rata Capaian				115.66

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

1. Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 3 target;
2. Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 1 target;
3. Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 1 target:

Selain itu, indikator kinerja peningkatan volume perdagangan masih menggunakan realisasi tahun 2022, karena hasil pengukuran realisasi tahun 2023 belum dirilis oleh BPS Kabupaten Balangan.

2. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas				
--	--	--	--	--

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas” adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase Koperasi Bekualitas	7.04	8.04	114.20

2.1. PERSENTASE KOPERASI BEKUALITAS

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengetahui koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Aset.

$$\begin{aligned} \text{Persentase Koperasi Bekualitas} &= \frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Aset di tahun N}}{\text{Jumlah seluruh koperasi di tahun N}} \times 100 \\ \text{Persentase Koperasi Bekualitas} &= \frac{9}{112} \times 100 = 8.04\% \end{aligned}$$

Hasil capaian persentase koperasi berkualitas adalah 8.04%. Merupakan hasil dari rekapitulasi 20 (dua puluh) koperasi yang

melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tahun 2023 dengan melihat hasil sisa hasil usaha (SHU) koperasi yang mengalami kenaikan. Perhitungan sisa hasil usaha (SHU) koperasi yaitu dengan membandingkan sisa hasil usaha (SHU) tahun berjalan dengan sisa hasil usaha (SHU) tahun n-1 apakah naik, turun atau pun tetap. Pada tahun 2023 didapatkan ada 9 (sembilan) koperasi yang sisa hasil usaha (SHU) meningkat.

Untuk memenuhi target indikator persentase koperasi berkualitas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan kegiatan pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap koperasi.
2. Melakukan pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Fasilitasi pelatihan perkoperasian bagi pengurus dan anggota koperasi.

Beberapa upaya akan dilakukan di tahun 2024 untuk mempertahankan/meningkatkan capaian, yaitu dengan meningkatkan penguasaan manajemen perkoperasian bagi pengurus dalam menjalankan usaha koperasi dalam menghadapi fluktuasi usaha dalam bentuk fasilitasi pelatihan perkoperasian.

Perbandingan realisasi Persentase Koperasi Berkualitas tahun 2021 s.d 2023 adalah sebagai berikut:

**Persentase Koperasi Berkualitas
Tahun 2021 s.d 2023**

Realisasi 2021 (%)	Realisasi 2022 (%)	Realisasi 2023 (%)
5.45	11.61	8.04

Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Laba Usaha Mikro

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Laba Usaha Mikro” adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase Usaha Mikro yang Hasil Labanya Meningkat	25.79	26.49	102.71

2.2. PERSENTASE USAHA MIKRO YANG HASIL LABANYA MENINGKAT

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengetahui jumlah usaha mikro yang labanya meningkat dari tahun sebelumnya melalui kegiatan pendataan UMKM.

$$\text{Persentase Usaha Mikro yang hasil labanya meningkat} = \frac{\text{Jumlah Usaha Mikro yang Labanya Meningkat di tahun } N}{\text{Jumlah Usaha Mikro di tahun } N} \times 100$$

$$\text{Persentase Usaha Mikro yang hasil labanya meningkat} = \frac{2.889}{10.904} \times 100 = 26.49 \%$$

Hasil capaian Persentase Usaha Mikro yang Hasil Labanya Meningkat adalah 26.49%. Merupakan hasil dari rekapitulasi data pendataan UMKM tahun 2023 dengan membandingkan laba yang diperoleh ditahun n terhadap laba yang diperoleh ditahun n-1 yang meningkat labanya.

Untuk memenuhi target indikator Persentase Usaha Mikro yang Hasil Labanya Meningkat, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan kegiatan pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan Pendataan UMKM Balangan
2. Fasilitasi Pembuatan NIB melalui OSS.
3. Fasilitasi Pelatihan UMKM.
4. Melakukan pendampingan bagi pelaku UKM.
5. Fasilitasi kemitraan usaha.
6. fasilitasi permodalan melalui CSR, Sanggam Bakabun dan Sanggam Babungas.
7. Fasiitasi pemberian peralatan/perlengkapan produksi dan/atau pemasaran bagi pelaku Usaha Mikro.

Beberapa upaya akan dilakukan di tahun 2024 untuk mempertahankan/meningkatkan capaian, diantaranya:

1. Mengoptimalkan aplikasi sidumba, melakukan sosialisasi/atau bimbingan teknis terhadap pentugas pendata dan aparat desa agar menghasilkan data UMKM yang akurat dan konperheship.
2. Memberikan berbagai fasiliitasi pengembangan usaha, bimbingan legalitas usaha, dan pelatihan manajemen kepada pelaku UMKM yang menunjukkan keseriusan menjadikan UMKM sebagai pekerjaan utama.

3. Menyelenggarakan bimtek/pelatihan pemanfaatan teknologi informasi, memberikan akses ke platform online dan memberikan dukungan teknis bagi pelaku UMKM.
4. Membuat program insentif untuk pelaku UMKM yang mandiri, memberikan bimbingan wirausaha, dan menciptakan jaringan kolaborasi antar UMKM.

Perbandingan realisasi Persentase Usaha Mikro yang Hasil Labanya Meningkat tahun 2021 s.d 2023 adalah sebagai berikut:

**Persentase Usaha Mikro yang Hasil Labanya Meningkat
Tahun 2021 s.d 2023**

Realisasi 2021 (%)	Realisasi 2022 (%)	Realisasi 2023 (%)
27,49	15,94	26.49

Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Produktivitas Perdagangan

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Produktivitas Perdagangan” adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target (Miliar Rupiah)	Realisasi (Miliar Rupiah)	Capaian (%)
1	Peningkatan Volume Perdagangan	791.20	751.05*	94.93

Keterangan :

* : Realisasi menggunakan realiasi tahun 2022

BPS, Kabupaten Balangan Dalam Angka 2023

2.3. PENINGKATAN VOLUME PERDAGANGAN

Indikator kinerja ini digunakan untuk menghitung peningkatan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor

Peningkatan Volume Perdagangan = Nilai PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor)

Peningkatan Volume Perdagangan = 751.05 Miliar Rupiah

Hasil capaian Peningkatan Volume Perdagangan adalah 751.05 Miliar Rupiah. Merupakan hasil dari Nilai PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) hasil perhitungan BPS tahun 2022.

Perbandingan realisasi Peningkatan Volume Perdagangan tahun 2021 s.d 2023 adalah sebagai berikut:

Peningkatan Volume Perdagangan

Tahun 2021 s.d 2023

Realisasi 2021 (Miliar Rupiah)	Realisasi 2022 (Miliar Rupiah)	Realisasi 2023 (Miliar Rupiah)
671.41	751.05	751.05*

Keterangan :

* : Realisasi menggunakan realiasi tahun 2022

BPS, Kabupaten Balangan Dalam Angka 2023

Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Perlindungan Konsumen

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Perlindungan Konsumen” adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target (Nilai)	Realisasi (Nilai)	Capaian (%)
1	Index Perlindungan Konsumen di Kabupaten Balangan	0.0480	0.0799	166.46

2.4. INDEX PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KABUPATEN BALANGAN

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur peningkatan kegiatan perlindungan konsumen, Semakin tinggi pencapaian indikator persentase pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai ketentuan, indikator persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga bahan pokok serta indikator persentase UTTP dan perlengkapannya yang bertanda tera sah akan menunjukkan nilai baik bagi Index Perlindungan Konsumen di Kabupaten Balangan.

$$\text{Index Perlindungan Konsumen di Kabupaten Balangan} = \frac{(A \text{ Tahun } n - A \text{ Tahun } n - 1) + \text{Nilai mutlak } (B \text{ Tahun } n - B \text{ Tahun } n - 1) + (C \text{ Tahun } n - C \text{ Tahun } n - 1)}{A \text{ Tahun } n - 1 + B \text{ Tahun } n - 1 + C \text{ Tahun } n - 1}$$

Keterangan:

A = Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Ijin Sesuai Ketentuan

B = Persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga bahan pokok

C = Persentase UTTP dan Perlengkapannya yang bertanda tera sah

$$\text{Index Perlindungan Konsumen di Kabupaten Balangan} = \frac{(16.80\% - 9.84\%) + (7.51\% - 6.10\%) + (29.94\% - 30.32\%)}{9.84\% + 6.10\% + 30.32\%}$$

$$= 0.0799 \%$$

Kabupaten

Balangan

Hasil capaian Index Perlindungan Konsumen di Kabupaten Balangan adalah 0.0799. Merupakan hasil dari capaian realisasi tahun berjalan dikurang capaian realisasi tahun lalu atas indikator persentase pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai ketentuan, indikator persentase

stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga bahan pokok serta indikator persentase UTTP dan perlengkapannya yang bertanda tera sah.

Untuk memenuhi target indikator Index Perlindungan Konsumen di Kabupaten Balangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan kegiatan pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Kegiatan meningkatkan tertib perizinan sektor perdagangan berupa:
 - a. Sosialisasi perizinan berusaha sektor perdagangan
 - b. Fasilitasi perizinan kepada pelaku usaha dengan bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Balangan.
2. Kegiatan meningkatkan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting berupa:
 - a. Melakukan pemantauan dan monitoring harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang ada dipasar
 - b. Melaksanakan operasi pasar sebanyak 42 (empat puluh dua) kali di 8 (delapan) kecamatan yang ada di Kabupaten Balangan dalam rangka pendendalian inflasi daerah.
3. Kegiatan meningkatkan tertib ukur

Melaksanakan tera tera ulang terdapat 11 (sebelas) tempat usaha utama yaitu 6 (enam) pasar seperti Paringin, Adaro, Batumandi, Halong, Bihara dan Lampihong, 3 (tiga) SPBU, 1 (satu) Pertashop dan 2 (dua) Perusahaan.
4. Kegiatan meningkatkan pengawasan metrologi legal dengan melaksanakan Sosialisasi tentang metrologi legal.

Beberapa upaya akan dilakukan di tahun 2024 untuk mempertahankan/meningkatkan capaian, diantaranya:

1. Penambahan sarana dan prasarana teknis (perangkat komputer/laptop khusus yang terkoneksi internet) untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam hal pelayanan pengajuan permohonan perizinan berusaha.
2. Sosialisasi dan/atau bimbingan teknis bagi aparaturnya pemerintahan desa sehingga pendataan/pemutakhiran data pelaku usaha yang perlu/wajib memiliki NIB dan belum memiliki NIB bisa tepat sasaran.

3. Meningkatkan kinerja tim pemantauan harga atau tim pengendali inflasi daerah dalam menyikapi gejolak harga yang terjadi secara nasional agar tidak memperburuk inflasi daerah.
4. Pendataan pelaku usaha perdagangan serta mengaktifkan laporan resi gudang untuk mendata jumlah penyimpanan bahan pokok sebagai alternatif karena belum adanya distributor besar/Gudang penyimpanan bahan pokok di Kabupaten Balangan.
5. Mengatur jadwal pemantauan harga barang dan jadwal kegiatan pasar murah agar efektif dan tidak saling berbenturan.
6. Melayani menyelesaikan uji pojok dan tera ulang bagi yang belum dapat terlayani ditahun 2023.
7. Perbaiki dan perluasan layanan tera atau tera ulang serta melaksanakan layanan terhadap pasar-pasar yang belum dijangkau di tahun 2023.

Perbandingan realisasi Index Perlindungan Konsumen di Kabupaten Balangan tahun 2021 s.d 2023 adalah sebagai berikut:

**Index Perlindungan Konsumen di Kabupaten Balangan
Tahun 2021 s.d 2023**

Realisasi 2021 (Nilai)	Realisasi 2022 (Nilai)	Realisasi 2023 (Nilai)
0.1440	0.0567	0.0799

Sasaran Strategis 5
Meningkatnya Pendapatan IKM

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Pendapatan IKM” adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase IKM yang Omzetnya Meningkat	1.18	1.18	100.00

2.5. PERSENTASE IKM YANG OMZETNYA MENINGKAT

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengidentifikasi jumlah IKM yang omzetnya meningkat.

$$\text{Persentase IKM yang Omzetnya Meningkat} = \frac{\text{Jumlah IKM yang omzetnya meningkat di tahun } N}{\text{jumlah IKM di tahun } N} \times 100$$

$$\text{Persentase IKM yang Omzetnya Meningkat} = \frac{29}{2.421} \times 100 = 1.18 \%$$

Hasil capaian Persentase IKM yang Omzetnya Meningkat adalah 1.18%. Merupakan hasil dari indentifikasi data IKM sandang dan IKM pangan tahun 2023 yang omzetnya mengalami peningkatan dengan cara membandingkan hasil penjualan ditahun N terhadap hasil penjualan ditahun N-1.

Untuk memenuhi target indikator Persentase IKM yang Omzetnya Meningkat, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan kegiatan pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Fasilitasi sertifikasi halal produk bagi IKM.
2. Pelatihan peningkatan kompetensi bagi IKM.
3. Pemberian bantuan mesin dan peralatan bagi IKM.
4. Fasilitasi pendaftaran merek produk bagi IkM.
5. Partisipasi dalam pameran atau expo untuk mempromosikan produk-produk bagi IKM.

Beberapa upaya akan dilakukan di tahun 2024 untuk mempertahankan/meningkatkan capaian, diantaranya:

1. Pengembangan kemampuan pelaku usaha industri sesuai kompetensi yang diperlukan.
2. Pendampingan terhadap pelaku usaha industri yang belum mahir menggunakan teknologi produksi.
3. Fasilitas berupa bantuan mesin dan peralatan bagi IKM.
4. Menjadikan sentra industri sebagai wadah pertemuan dengan para pelaku usaha industri.
5. Menjalin kerja sama dengan instansi/pihak swasta terkait pengembangan produk IKM sesuai potensi pasar.

Perbandingan realisasi Persentase IKM yang Omzetnya Meningkat tahun 2021 s.d 2023 adalah sebagai berikut:

**Persentase IKM yang Omzetnya Meningkat
Tahun 2021 s.d 2023**

Realisasi 2021 (%)	Realisasi 2022 (%)	Realisasi 2023 (%)
		1.18

3. REALISASI ANGGARAN

Pencapaian kinerja keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan pada tahun anggaran 2023 untuk Belanja sebesar **Rp. 19.570.526.816, -** dengan Realisasi sebesar **Rp. 17.938.103.598, -** atau **91.66%**. Untuk lebih jelas terkait pencapaian kinerja keuangan berdasarkan rekening belanja dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai berikut :

URAIAN	RENCANA		REALISASI	
	Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5
Belanja Daerah	19,570,526,816	100	17,938,103,598	91.66
Belanja Operasi	18,606,275,316	100	16,997,862,098	91.36
Belanja Pegawai	6,258,975,666	100	5,745,981,747	91.80
Belanja Barang dan Jasa	12,347,299,650	100	11,251,880,351	91.13
Belanja Modal	964,251,500	100	940,241,500	97.51
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	156,571,500	100	136,545,500	87.21
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	807,680,000	100	803,696,000	99.51

Rincian anggaran beserta realisasi dari masing-masing program, kegiatan beserta sub kegiatan yang menggambarkan akuntabilitas kinerja keuangan adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN		REALISASI KEUANGAN		EFISIENSI KEUANGAN	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7,880,122,216	100	7,293,521,203	92.56	586,601,013	7.44
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21,200,400	100	17,716,000	83.56	3,484,400	16.44
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	10,170,400	100	8,682,000	85.37	1,488,400	14.63
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	11,030,000	100	9,034,000	81.90	1,996,000	18.10
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,526,071,666	100	6,000,354,147	91.94	525,717,519	8.06
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,253,775,666	100	5,744,381,747	91.85	509,393,919	8.15
	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	272,296,000	100	255,972,400	94.01	16,323,600	5.99
3	Administrasi Umum perangkat daerah	692,564,000	100	680,257,100	98.22	12,306,900	1.78
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	71,290,300	100	71,061,000	99.68	229,300	0.32
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	116,336,800	100	110,005,000	94.56	6,331,800	5.44
	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	32,894,500	100	32,858,000	99.89	36,500	0.11

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN		REALISASI KEUANGAN		EFISIENSI KEUANGAN	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8,267,700	100	8,100,000	97.97	167,700	2.03
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	463,774,700	100	458,233,100	98.81	5,541,600	1.19
4	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	57,779,200	100	57,745,500	99.94	33,700	0.06
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	57,779,200	100	57,745,500	99.94	33,700	0.06
5	Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	361,991,300	100	342,673,456	94.66	19,317,844	5.34
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132,302,200	100	125,310,656	94.72	6,991,544	5.28
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	229,689,100	100	217,362,800	94.63	12,326,300	5.37
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah	220,515,650	100	194,775,000	88.33	25,740,650	11.67
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	198,595,050	100	172,999,000	87.11	25,596,050	12.89
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	21,920,600	100	21,776,000	99.34	144,600	0.66
B	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	72,167,600	100	71,492,700	99.06	674,900	0.94

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN		REALISASI KEUANGAN		EFISIENSI KEUANGAN	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	72,167,600	100	71,492,700	99.06	674,900	0.94
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	22,824,800	100	22,564,800	98.86	260,000	1.14
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	49,342,800	100	48,927,900	99.16	414,900	0.84
C	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	39,046,400	100	38,970,400	99.81	76,000	0.19
1	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ kota	39,046,400	100	38,970,400	99.81	76,000	0.19
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	39,046,400	100	38,970,400	99.81	76,000	0.19
D	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	444,850,200	100	439,771,900	98.86	5,078,300	1.14

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN		REALISASI KEUANGAN		EFISIENSI KEUANGAN	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	444,850,200	100	439,771,900	98.86	5,078,300	1.14
	Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro	142,642,900	100	142,331,500	99.78	311,400	0.22
	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	94,564,200	100	93,287,100	98.65	1,277,100	1.35
	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	207,643,100	100	204,153,300	98.32	3,489,800	1.68
E	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2,074,138,700	100	2,055,959,600	99.12	18,179,100	0.88
1	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	2,074,138,700	100	2,055,959,600	99.12	18,179,100	0.88
	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran, SDM, serta Desain dan teknologi	2,074,138,700	100	2,055,959,600	99.12	18,179,100	0.88
F	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	60,510,000	100	53,360,000	88.18	7,150,000	11.82
1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	38,730,000	100	35,320,000	91.20	3,410,000	8.80

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN		REALISASI KEUANGAN		EFISIENSI KEUANGAN	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	38,730,000	100	35,320,000	91.20	3,410,000	8.80
2	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	21,780,000	100	18,040,000	82.83	3,740,000	17.17
	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	21,780,000	100	18,040,000	82.83	3,740,000	17.17
G	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3,241,612,900	100	2,954,158,663	91.13	287,454,237	8.87
1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3,005,218,900	100	2,805,528,513	93.36	199,690,387	6.64
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1,755,624,200	100	1,637,289,900	93.26	118,334,300	6.74
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1,249,594,700	100	1,168,238,613	93.49	81,356,087	6.51
2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	236,394,000	100	148,630,150	62.87	87,763,850	37.13

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN		REALISASI KEUANGAN		EFISIENSI KEUANGAN	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	159,987,600	100	89,900,750	56.19	70,086,850	43.81
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	76,406,400	100	58,729,400	76.86	17,677,000	23.14
H	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	564,145,600	100	552,866,739	98.00	11,278,861	2.00
1	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	564,145,600	100	552,866,739	98.00	11,278,861	2.00
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	101,437,300	100	90,841,300	89.55	10,596,000	10.45
	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	462,708,300	100	462,025,439	99.85	682,861	0.15
I	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	2,419,079,800	100	2,119,003,756	87.60	300,076,044	12.40
1	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2,419,079,800	100	2,119,003,756	87.60	300,076,044	12.40

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN		REALISASI KEUANGAN		EFISIENSI KEUANGAN	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pameran Dagang Nasional	2,279,517,900	100	2,010,536,471	88.20	268,981,429	11.80
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	139,561,900	100	108,467,285	77.72	31,094,615	22.28
J	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	137,310,000	100	52,376,700	38.14	84,933,300	61.86
1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	137,310,000	100	52,376,700	38.14	84,933,300	61.86
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	137,310,000	100	52,376,700	38.14	84,933,300	61.86
K	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	217,792,200	100	216,738,900	99.52	1,053,300	0.48
1	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	217,792,200	100	216,738,900	99.52	1,053,300	0.48
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	147,689,400	100	146,942,100	99.49	747,300	0.51
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	70,102,800	100	69,796,800	99.56	306,000	0.44
L	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1,108,923,400	100	1,020,087,585	91.99	88,835,815	8.01
1	Penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota	1,108,923,400	100	1,020,087,585	91.99	88,835,815	8.01

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN		REALISASI KEUANGAN		EFISIENSI KEUANGAN	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1,108,923,400	100	1,020,087,585	91.99	88,835,815	8.01
M	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	140,238,300	100	70,719,300	50.43	69,519,000	49.57
1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	140,238,300	100	70,719,300	50.43	69,519,000	49.57
	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten / kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegritas dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	140,238,300	100	70,719,300	50.43	69,519,000	49.57
N	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	1,170,589,500	100	999,076,152	85.35	171,513,348	14.65
1	Penyediaan informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI,	1,170,589,500	100	999,076,152	85.35	171,513,348	14.65

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN		REALISASI KEUANGAN		EFISIENSI KEUANGAN	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota						
	Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	180,424,800	100	178,690,200	99.04	1,734,600	0.96
	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas Kabupaten/Kota	990,164,700	100	820,385,952	82.85	169,778,748	17.15
	JUMLAH	19,570,526,816	100	17,938,103,598	91.66	1,632,423,218	8.34

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tahun 2023 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan capaian diatas angka 91.00%, meskipun begitu tetap membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif seluruh jajaran yang berada dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan agar capaian kinerja sasaran tersebut tidak mengalami penurunan kinerja. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tahun 2023 Secara keseluruhan dinyatakan "**Sangat Tinggi**", karena capaian rata-ratanya sebesar **115.66%** dari target. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator yang menunjang kinerja sasaran strategis tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.

LAMPIRAN